

Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Online PBB (SIPP PAKDE)

Novitasari*, Nur Kholis

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

e-mail: : *novitasari331.ns@gmail.com , nurkholis_nuko@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pajak merupakan kewajiban bagi penduduk disuatu wilayah negara sebagai bentuk kontribusi dalam membiayai rumah tangga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perilaku wajib pajak terhadap penerapan sistem pembayaran online PBB (Sipp Pakde). Sipp Pakde merupakan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta mempermudah wajib pajak dalam melunasi kewajiban pajaknya. Sipp Pakde dilengkapi dengan berbagai macam fitur layanan PBB, BPHTB, pemeriksaan ID billing, informasi SPPT serta grafik peta monitoring pajak daerah. Pemerintah berharap dengan website ini pajak Karanganyar menjadi lebih terbuka. Populasi penelitian merupakan wajib pajak Kabupaten Karanganyar. Sampel diambil menggunakan pendekatan *purposive sampling* dengan kriteria merupakan wajib pajak Karanganyar dan sudah pernah melakukan pembayaran online PBB. Jenis data primer dan memperoleh 100 orang. Menggunakan analisis regresi linier berganda dengan SPSS 19. Mayoritas wajib pajak menjawab setuju dengan sistem pembayaran online PBB yang diterapkan pemerintah Karanganyar, dibuktikan melalui persepsi kemudahan penggunaan, manfaat yang didapatkan, tingkat kepercayaan mempengaruhi secara simultan terhadap variabel penerapan sistem pembayaran online PBB

Kata kunci : Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat, Tingkat Kepercayaan, Sistem Pembayaran Online PBB

ABSTRACT

Taxes are an obligation for residents of a country's territory as a form of contribution in financing the country's household. This study aims to analyze the behavior of taxpayers towards the implementation of the PBB online payment system (Sipp Pakde). Sipp Pakde is an innovation to optimize regional income and make it easier for taxpayers to pay off their tax obligations. Sipp Pakde is equipped with various features of PBB, BPHTB, billing ID checks, SPPT information and local tax monitoring map graphs. The government hopes that with this website, the tax collection will be more open. The research population is the taxpayer of Karanganyar Regency. The sample was taken using a purposive sampling approach with the criteria of being a Karanganyar taxpayer and having made online PBB payments. Types of primary data and obtain 100 people. Using multiple linear regression analysis with SPSS 19. The majority of taxpayers answered agree with the PBB online payment system implemented by the Karanganyar government, as evidenced by the perception of ease of use, the benefits obtained, the level of trust that simultaneously affects the variables of the implementation of the PBB online payment system

Keywords : *Ease Perception, Benefit Perception, level of trust, PBB Online System Payment.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban bagi penduduk disuatu wilayah negara sebagai bentuk kontribusi dalam membiayai rumah tangga negara. Pajak ialah sumbangan rakyat terhadap kas negara yang berlandaskan UU bersifat mengikat tanpa mendapat balasan secara langsung, pada umumnya dipakai untuk pembiayaan negara (Mardiasmo, 2016). Perpajakan merupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan negara, karena pajak merupakan penghasilan negara yang

pasti. PBB merupakan tanggungjawab bagi setiap warga negara yang mendapat manfaat serta keabsahan memanfaatkan tanah beserta bangunan. Pemerintahan daerah melalui DJP bertanggungjawab dalam pemungutan sektor desa dan kota (PBB P2) sedangkan pemerintah pusat bertanggungjawab melakukan pemungutan sektor tambang, hutan dan kebun (PBB P3). Mulanya tata kelola pajak dikerjakan secara manual cara tersebut dinilai inefisiensi, dizaman mutakhir seperti sekarang pemerintah mengalihkan tata kelola pajak melalui sistem informasi dan komunikasi (Khasanah & Rachman, 2021). Modernisasi sistem perpajakan merupakan upaya pemerintah dalam menerapkan sistem administrasi secara terbuka dengan penggunaan teknologi yang kredibel, pemerintah berupaya memajukan mutu pelayanan pajak agar mampu menumbuhkan produktivitas tenaga perpajakan (Farandy, 2018). Pelayanan berbasis teknologi merupakan tindakan pemerintah dalam mengoptimalkan koordinasi antara petugas pajak dengan masyarakat melalui penggunaan teknologi informatika. Sistem pembayaran berbasis online mencakup dua hal penting yaitu kerumitan dan manfaat dari sistem yang diterapkan. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap pelunasan pbb, sehingga mampu memberikan dampak yang positif bagi sistem perpajakan (Banabera, 2019).

Penelitian sebelumnya (Fidiana, 2018) menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan pajak secara online meningkat pada sektor pajak hotel dan pajak parkir, tetapi tidak berdampak pada pajak restoran. Pengelolaan bisnis restoran dilakukan secara maksimal dengan begitu perolehan pajak akan teridentifikasi, namun perolehan pajak dinilai masih belum stabil. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran online mampu memajukan tingkat keefektifan pemungutan pajak daerah Surabaya. Pembayaran online masih harus dikaji dan dikembangkan supaya menjadi sistem yang terpercaya. Penelitian (Lutfhiyah, 2020) SAMPADÉ diresmikan pemerintah malang kota tahun 2018, sistem tersebut adalah layanan *E-government* difokuskan untuk pelayanan masyarakat malang. Dengan aplikasi yang diluncurkan BP2D diharapkan pemerintah mampu memberikan pelayanan publik, masyarakat juga merasa dimudahkan dalam membayar pajak karena pembayaran menggunakan aplikasi cenderung efektif dan efisien.

Penelitian (Sitinjak, 2019) bahwa persepsi kemudahan memberikan dampak signifikan terhadap pemakaian aplikasi Go-Pay. Penelitian (Primastiwi et al., 2020) menjelaskan persepsi manfaat yang didapatkan mempengaruhi signifikan positif terhadap penerapan pembayaran PBB dengan aplikasi Go-Pay di Kabupaten Sleman. Tingkat kepercayaan secara positif berpengaruh terhadap penggunaan uang digital (Listianti, 2018). Sejalan dengan penelitian (Pratama & Suputra, 2019) menunjukkan persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan serta tingkat kepercayaan memberikan pengaruh positif terhadap penggunaan *Electronic Money*. Pada penelitian terdahulu variabel persepsi kemudahan penggunaan, manfaat yang didapatkan serta tingkat kepercayaan digunakan untuk menguji transaksi pembayaran online secara keseluruhan dan tidak spesifik layanan pembayaran PBB. Pada penelitian ini penulis ingin menguji secara spesifik transaksi pembayaran online PBB apakah dengan pembayaran online dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, selain itu penulis menggabungkan 3 variabel bebas dari penelitian sebelumnya yaitu persepsi kemudahan penggunaan, manfaat yang didapatkan serta tingkat kepercayaan, dengan variabel terikat penerapan sistem pembayaran online PBB.

Bersumber dari Gatra TV yang ditayangkan di *YouTube* tanggal 19 Januari 2021, pemerintah Kabupaten Karanganyar meluncurkan aplikasi Situs Portal Pelayanan Pajak Daerah dapat diakses di <https://pendapatan.karanganyarkab.go.id/> dan QRIS pada tanggal 13 Januari 2021 bertempat di Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Upaya tersebut dilakukan pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan kualitas pelayanan PBB, utamanya dimasa pandemi Covid-19. Sipp Pakde merupakan inovasi digitalisasi sistem perpajakan sehingga mempermudah wajib pajak dalam mendaftar, memeriksa maupun membayar pajak secara online, website Sipp Pakde dilengkapi dengan berbagai macam fitur didalamnya, antara lain layanan PBB, layanan BPHTB, verifikasi NOP, pemeriksaan ID billing, informasi SPPT, serta grafik peta monitoring pajak daerah dengan Sipp Pakde diharapkan sistem perpajakan Kabupaten Karanganyar menjadi lebih transparan karna website ini juga menampilkan realisasi penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui iBanking Bank Jateng, kemudian pembayaran QRIS melalui EBIMA apps, Gopay, OVO, DANA dan Link Aja. Website yang diluncurkan pemerintah

Karanganyar terbilang baru, sehubungan dengan hal tersebut penulis ingin mengetahui tanggapan masyarakat terhadap sistem pembayaran online yang telah di terapkan. Penelitian ini juga mempermudah pemerintah dalam melakukan evaluasi terkait sistem pembayaran online. Motivasi penulis untuk mengetahui apakah wajib pajak merasa terbantu dengan program yang diterapkan pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah Karanganyar dalam menganalisis perilaku wajib pajak sehingga sistem pembayaran online dapat dioptimalkan, dan untuk mengetahui apakah inovasi yang diterapkan pemerintah Karanganyar memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan sistem pembayaran PBB secara online.

Sebanyak 439.813 lembar SPPT PBB Kabupaten Karanganyar berhasil di distribusikan kepada wajib pajak pada tahun 2020. Dengan target ketetapan pajak Rp 30.952.232.388. SPPT tersebut meningkat 6,579 lembar dibanding tahun 2019, namun target realisasi PBB tahun 2020 dinilai belum optimal.

Tabel.1 Data realisasi pembayaran PBB Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

NO	NAMA KECAMATAN	TARGET KETETAPAN POKOK	REALISASI POKOK	PIUTANG POKOK	%
1	JATIPURO	440.965.679	440.965.679	-	100,00%
2	JATIYOSO	411.133.719	410.627.329	506.390	99,88%
3	JUMAPOLO	606.499.190	605.150.201	1.348.989	99,78%
4	JUMANTONO	387.012.778	385.685.116	1.327.662	99,66%
5	MATESIH	531.288.325	504.732.382	26.555.943	95,00%
6	TAWANGMANGU	1.306.971.866	1.053.249.196	253.722.670	80,59%
7	NGARGOYOSO	297.546.739	290.178.126	7.368.613	97,52%
8	KARANGPANDAN	916.237.331	613.780.207	302.457.124	66,99%
9	KARANGANYAR	2.831.157.766	2.042.684.642	788.473.124	72,15%
10	TASIKMADU	1.569.444.738	1.184.836.962	384.607.776	75,49%
11	JATEN	6.853.991.256	5.807.430.262	1.046.560.994	84,73%
12	COLOMADU	6.720.595.299	4.107.750.843	2.612.844.456	61,12%
13	GONDANGREJO	2.252.125.943	1.793.494.594	458.631.349	79,64%
14	KEBAKKRAMAT	4.592.796.974	4.308.027.134	284.769.840	93,80%
15	MOJOGEDANG	663.998.918	611.479.491	52.519.427	92,09%
16	KERJO	352.177.547	274.838.851	77.338.696	78,04%
17	JENAWI	218.288.320	212.937.752	5.350.568	97,55%
	JUMLAH	30.952.232.388	24.647.848.767	6.304.383.621	79,63%

Sumber BKD Karanganyar, 2020

Realisasi PBB tahun 2020 sebesar Rp 24.647.848.767 atau 79,63% dari target ketetapan Rp 30.952.232.388. Penghapusan denda keterlambatan pembayaran PBB nyatanya tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, keadaan tersebut mengakibatkan ketetapan PBB tidak tercapai. Menurut artikel yang diterbitkan Solo Pos faktor yang mempengaruhi realisasi PBB tidak tercapai adalah pandemi Covid-19. Terkait hal tersebut pemerintah kabupaten karanganyar meluncurkan inovasi yang bertujuan untuk membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya meski di masa pandemi. Inovasi ini merupakan terobosan pemerintah Karanganyar untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Menurut Gatra TV yang ditayangkan di *YouTube* tanggal 19 Januari 2021, aplikasi Sipp Pakde terbilang baru sehingga perlu dilakukan evaluasi apakah respon masyarakat positif atau malah sebaliknya, masyarakat merasa dipersulit karena kurangnya pengetahuan mengenai aplikasi yang diterapkan pemerintah Karanganyar.

Penurunan presentase pendapatan PBB tahun 2020 mengakibatkan target tidak tercapai. Sistem informasi menjadi langkah yang harus di kembangkan untuk mempermudah pembayaran PBB, dengan menerapkan sistem pembayaran online pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan mengurangi tingkat denda terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, selain itu dapat mengefisienkan waktu dan meminimalisir tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oknum tertentu dalam pembayaran pajak. Dengan sistem pembayaran online wajib pajak dapat

berhubungan langsung dengan pegawai pemerintah yang mengoperasikan sistem tersebut (Leliya & Afiyah, 2016). Penelitian (Anggraini, 2020) menyatakan bahwa *payment online system* belum berpengaruh signifikan pada masyarakat rokan hulu, dibuktikan tahun 2017 banyak objek pajak yang didaftarkan PBB-P2 tetapi tahun 2018 banyak SPPT belum dilunasi walaupun pemerintah sudah mempermudah pembayarannya, hasil tersebut tidak sejalan dengan (Leliya & Afiyah, 2016) yang memperoleh hasil bahwa sistem pembayaran online berpengaruh signifikan dalam memberikan manfaat untuk wajib pajak, dengan efisiensi waktu pembayaran dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Sipp Pakde adalah terobosan terbaru pemerintah Karanganyar dimasa pandemi C-19 inovasi tersebut diharapkan mampu memudahkan masyarakat, survey diperlukan untuk mengetahui apakah wajib pajak puas dengan sistem pembayaran online yang ditetapkan. Variabel persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat yang didapatkan serta tingkat kepercayaan apakah berpengaruh terhadap penerapan sistem pembayaran online PBB kabupaten karanganyar, merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode kuantitatif berdasarkan teori positivisme, menggunakan alat ukur instrumen untuk menguji hasil penelitian. Hasil penelitian berupa angka dan dapat dihitung dengan statistika. Populasi ialah penyamarataan karakteristik suatu wilayah tertentu yang tersusun dari objek dan subyek yang digunakan untuk memperoleh hasil serta memutuskan simpulan. Populasi merupakan wajib pajak PBB di Kabupaten Karanganyar sejumlah 439.813 wajib pajak. Menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu pemungutan sampel dengan tidak memberi keleluasaan sejajar pada populasi yang akan menjadi sampel. Mengaplikasikan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan mempertimbangkan karakteristik secara spesifik (Sugiono, 2017). Sampel sejumlah 100 wajib pajak didapat dari rumus slovin. Data primer didapat dari penyebaran kuesioner menggunakan skala linkert ordinal. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda.

Persamaan regresinya adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden merupakan 100 wajib pajak karanganyar yang sudah pernah melakukan pembayaran pbb secara online.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Presentasi
Jenis Kelamin	Laki-laki	46	46
	Perempuan	54	54
Jumlah			100%
Umur	18 s.d 25 tahun	15	15
	26 s.d 35 tahun	44	44
	36 s.d 45 tahun	21	21
	lebih dari 45 tahun	20	20
Jumlah			100%
Pendidikan	SD	2	2
	SMP	3	3
	SMA/SMK	44	44
	D1/D2/D3	16	16
	S1	35	35
Jumlah			100%

Sumber : data primer diolah, (2021)

Responden laki-laki sejumlah 46 dan perempuan 54 orang. Sebagian besar responden berusia 26-35 tahun sejumlah 44 orang dan responden berpendidikan SMA/SMK sejumlah 44 orang.

Tabel 3. Uji Validitas Data

Variabel	R hitung	R tabel
Persepsi Kemudahan Penggunaan	0,710	0,196
	0,764	0,196
	0,805	0,196
	0,746	0,196
Persepsi Manfaat yang Didapatkan	0,676	0,196
	0,788	0,196
	0,779	0,196
	0,758	0,196
Tingkat Kepercayaan	0,712	0,196
	0,687	0,196
	0,711	0,196
	0,704	0,196
Penerapan Sistem Pembayaran Online PBB	0,711	0,196
	0,675	0,196
	0,703	0,196
	0,646	0,196

Sumber : data primer diolah, (2021)

Uji validitas data masing-masing indikator persoalan adalah valid/layak sebab $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, rumus *degree of freedom* (df) = 100 (jumlah responden) - 2 = 98 digunakan untuk menentukan $r \text{ tabel}$. Pada df 98 diperoleh $r \text{ tabel}$ sebesar 0,196. Dengan kriteria tersebut hasil validitas dinyatakan valid.

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Persepsi Kemudahan Penggunaan	0,751
Persepsi Manfaat yang Didapatkan	0,742
Tingkat Kepercayaan	0,656
Penerapan Sistem Pembayaran Online PBB	0,633

Sumber : data primer diolah, (2021)

Variabel dikatakan reliabel apabila Cronbach's Alpha $> 0,60$. Berdasarkan hasil uji diatas Cronbach's Alpha $> 0,60$ maka seluruh item pertanyaan dikatakan reliabel.

Tabel 5. Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0.742
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,641

Sumber : data primer diolah, (2021)

Menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Data dikatakan berdistribusi normal jika Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05. Berdasarkan kriteria tersebut, pengujian yang dijalankan berdistribusi normal sebab Asymp. Sig. (2-tailed) 0,641 > 0,05.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Persepsi Kemudahan Penggunaan (X ₁)	0,701	1.426
Persepsi Manfaat yang Didapatkan (X ₂)	0,570	1.753
Tingkat Kepercayaan (X ₃)	0,637	1.570

Sumber : data primer diolah, (2021)

Kriteria yang digunakan VIF < 10 atau tolerance ≥ 0,10 sehingga tidak terdapat multikolinearitas. Berdasarkan kriteria tersebut, pengujian yang dijalankan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	T	Sig.
Persepsi Kemudahan Penggunaan (X ₁)	-0,922	0,359
Persepsi Manfaat yang Didapatkan (X ₂)	-0,135	0,893
Tingkat Kepercayaan (X ₃)	-1.234	0,220

Sumber : data primer diolah, (2021)

Kriteria heteroskedastisitas Uji Glejser tingkat signifikansi > 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan kriteria tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas antar variabel independen.

Tabel 8. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

	Koefisien	t	Sig	Keterangan
Persepsi Kemudahan Penggunaan (X ₁)	0,129	2,018	0,046*	Berpengaruh
Persepsi Manfaat yang Didapatkan (X ₂)	0,327	4.396	0,000*	Berpengaruh
Tingkat Kepercayaan (X ₃)	0,214	2.912	0,004*	Berpengaruh
Konstanta	6,791	5.795	0,000	
Variabel dependen	Penerapan Sistem Pembayaran Online PBB			
Adjusted R Square	0,494			
F	33,255			
Signifikansi	0,000 ^a			

Signifikansi $\alpha < 0,05$

Sumber : data primer diolah, (2021)

Persamaan regresi penelitian yang dijalankan :

$$Y = 6,791 + 0,129X_1 + 0,327X_2 + 0,214 X_3 + e$$

1. Penerapan Sistem Pembayaran Online PBB

Konstanta variabel Y sebesar 6.791 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan variabel persepsi kemudahan penggunaan (X₁), persepsi manfaat yang didapatkan (X₂) serta tingkat kepercayaan (X₃) maka variabel penerapan sistem pembayaran online PBB (Y) bernilai positif 6,791 satuan.

2. Persepsi Kemudahan Penggunaan

Koefisien regresi Persepsi Kemudahan Penggunaan (X₁) sejumlah 0,129 hasil tersebut menyatakan bahwa setiap kenaikan satuan variabel persepsi kemudahan penggunaan (X₁) maka

nilai penerapan sistem pembayaran online PBB (Y) mengalami kenaikan sejumlah 0,1259 satuan.

3. Persepsi Manfaat yang Didapatkan

Koefisien regresi Persepsi Manfaat yang Didapatkan (X_2) sejumlah 0,327 hasil tersebut menyatakan bahwa setiap kenaikan satuan variabel persepsi persepsi manfaat yang didapatkan (X_2) maka nilai penerapan sistem pembayaran online PBB (Y) mengalami kenaikan sejumlah 0,327 satuan.

4. Tingkat Kepercayaan

Koefisien regresi Tingkat Kepercayaan (X_3) sejumlah 0,214 hasil tersebut menyatakan bahwa setiap kenaikan satuan variabel tingkat kepercayaan (X_3) maka nilai penerapan sistem pembayaran online PBB (Y) mengalami kenaikan sejumlah 0,214 satuan.

Signifikansi uji-t variabel bebas $< 0,05$ maka variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, berikut hasil pengujian hipotesis :

1. Persepsi kemudahan penggunaan (X_1) Sig. 0,046 $< 0,05$ berarti persepsi kemudahan penggunaan mempengaruhi variabel penerapan sistem pembayaran online PBB.
2. Persepsi Manfaat yang Didapatkan (X_2) Sig. 0,000 $< 0,05$ berarti persepsi manfaat yang didapatkan mempengaruhi variabel penerapan sistem pembayaran online PBB.
3. variabel Tingkat Kepercayaan (X_3) Sig. 0,004 $< 0,05$ berarti variabel tingkat kepercayaan mempengaruhi variabel penerapan sistem pembayaran online PBB.

Seluruh variabel bebas mempengaruhi secara simultan terhadap variabel terikat dengan kriteria pengujian Sig. uji F $< 0,05$ dan uji F sejumlah 33,255 dengan nilai signifikansi 0,000^a hasil tersebut menunjukkan variabel persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat yang didapatkan serta tingkat kepercayaan secara bersama-sama mempengaruhi variabel penerapan sistem pembayaran online PBB.

Koef.determinasi (Rsquare) sejumlah 0,494 atau 49,4% berarti Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat yang Didapatkan dan Tingkat Kepercayaan terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Online PBB bernilai positif 49,4 % serta 50,6% dipengaruhi faktor diluar penelitian.

Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Online PBB

Pengujian hipotesis pertama diterima, dibuktikan dari tingkat signifikan uji-t 0,046 $< 0,05$ menyatakan persepsi kemudahan memberikan pengaruh positif terhadap penerapan sistem pembayaran online PBB. Mayoritas responden menjawab sistem yang diterapkan pemerintah cukup mudah untuk digunakan. Hasil penelitian yang dijalankan sesuai dengan penelitian (Sitinjak, 2019) bahwa persepsi kemudahan penggunaan mempengaruhi secara positif terhadap penerapan pembayaran dengan aplikasi go-pay.

Pengaruh Persepsi Manfaat yang Didapatkan terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Online PBB

Pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh persepsi manfaat yang didapatkan terhadap penerapan sistem pembayaran online PBB menunjukkan sig. uji-t 0,000 $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Persepsi manfaat yang didapatkan memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap penerapan sistem pembayaran online PBB. Pembayaran PBB Online dirasa mampu meningkatkan produktivitas kerja serta pembayaran PBB menjadi lebih efektif dan efisien sehingga memberikan pengaruh positif terhadap penerapan sistem pembayaran online PBB. Sejalan dengan (Primastiwi et al., 2020) menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan mempengaruhi secara positif serta signifikan terhadap pembayaran PBB Online dengan aplikasi go-pay di kabupaten Sleman.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Online PBB

Pengujian hipotesis ketiga mengenai pengaruh tingkat kepercayaan terhadap penerapan sistem pembayaran online PBB menunjukkan nilai signifikansi uji-t 0,005 $< 0,05$ maka hipotesis penelitian ini diterima. Tingkat kepercayaan memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap

penerapan sistem pembayaran online PBB. Wajib pajak percaya sistem yang diterapkan resmi dari pemerintah dan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Sejalan dengan penelitian penelitian (Pratama & Suputra, 2019) yang menyatakan tingkat kepercayaan mempengaruhi secara positif terhadap minat penggunaan uang elektronik.

Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat yang Didapatkan, Tingkat Kepercayaan terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Online PBB

Pengujian hipotesis keempat mengenai persepsi kemudahan penggunaan, manfaat yang didapatkan, tingkat kepercayaan terhadap penerapan sistem pembayaran online PBB menunjukkan nilai signifikansi uji F $0,000 < 0,05$ maka hasil penelitian yang dijalankan diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat yang didapatkan serta tingkat kepercayaan memberikan pengaruh dengan cara simultan dan signifikan positif terhadap penerapan sistem pembayaran online PBB. Pengaruh variabel independen sebesar 49,4% sedangkan sisanya sebanyak 50,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 19 menunjukkan bahwa Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat yang Didapatkan serta Tingkat Kepercayaan memberikan dampak signifikan positif terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Online PBB. Masyarakat merasa terbantu dengan inovasi yang diluncurkan karena dinilai lebih efektif dan efisien, serta percaya bahwa aplikasi tersebut resmi dari pemerintah Karanganyar. Kedepannya pemerintah diharapkan mampu mengembangkan aplikasi Sipp Pakde untuk menekan potensi kebocoran pajak daerah serta dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada penelitian ini penulis belum mampu membandingkan pendapatan pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem pembayaran online PBB, maka pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti mampu membandingkan pendapatan pajak sebelum dan sesudah diterapkan sistem pembayaran online PBB serta dapat menambah variabel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, L. (2020). *Analisis Payment Online System Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu*.
- Banabera, G. I. S. (2019). Analisis Inovasi Pemerintahan Digital Village dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(2), 203–212.
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–119.
- Fidiana, A. R. R. (2018). Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum Dan Sesudah Sistem Pajak Online. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 272.
- Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Factors Affecting Taxpayer Compliance in Paying Pbb Pendahuluan* (Vol. 5, Issue 1).
- Leliya, & Afiyah, F. (2016). Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon. *Jurnal AL-Mustashfa*, 4(2), 158–177.
- Listianti, U. Y. (2018). *Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Manfaat*

Terhadap Minat Penggunaan E-Money Pada Mahasiswa Feb Ums.

- Lutfhiyah, U., Saputri, L. D., & Hati, F. M. (2020). Efisiensi Pembayaran Pajak Berbasis Online Dalam Rangka Penerapan Program Smart City Di Kota Malang.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Nurtantiono, A. (2021). Analisis Regresi Kasus dan Analisis dengan SPSS. Sukoharjo: STIE Surakarta.
- Pratama, A. B., & Suputra, I. D. G. D. (2019). Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Minat Menggunakan Uang Elektronik. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 927.
- Primastiwi, A., Wardani, D. K., & Hermalia, H. (2020). Persepsi Kemanfaatan dan Kemudahan Wajib Pajak dalam Membayar PBB Menggunakan GO-PAY. *Equity*, 23(2), 137.
- Sugiono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Tony Sitinjak, M. (2019). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital Go-Pay. *Jurnal Manajemen*, 8(2), 27–39.